

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Geliat perekonomian nasional melalui pertumbuhan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia semakin berkembang. Pada Tahun 2014-2018 saja jumlah UMKM lebih dari 64 juta unit, dengan tingkat pertumbuhan 2% per tahun. Pertumbuhan UMKM menjadikan sektor *riil* ini dikatakan sebagai tulang punggung yang menopang perekonomian Indonesia untuk menghadapi terjadinya krisis global.

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor ini belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai Tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir Tahun 2018 sebesar 20%.

Melihat potensi yang luar biasa dari sektor UMKM, secara khusus pemerintah memberikan dukungan agar pelaku UMKM dapat terus bertambah dengan tingkat kemandirian keuangan yang menanjak. Beberapa bentuk dukungan pemerintah antara lain:

1. Bukti dukungan pemerintah di sektor perpajakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Untuk mendukung keuntungan dan ekspansi bisnis UMKM.
2. Mempercepat perizinan dalam berusaha dengan meluncurkan aplikasi perijinan *single submission*. Melalui aplikasi tersebut diberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
3. Mendirikan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM). Dengan skema bunga yang disalurkan yaitu antara 4,5 persen hingga 7 persen per tahun.
4. Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan program PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
5. Memperluas akses pasar bagi UMKM, contohnya program pameran *Mall-to-Mall* bekerjasama dengan APBI (Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia), program gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *Go Online*, keberadaan Rumah Kreatif BUMN (RKB) untuk meningkatkan wawasan dan daya saing para pelaku usaha yang digagas oleh PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tingginya potensi UMKM yang ada di Indonesia dalam perkembangan pertumbuhan sektor perekonomian, tidak diimbangi dengan kualitas UMKM itu sendiri. Seperti kurang baiknya UMKM dalam mengolah laporan keuangan yang merupakan faktor kunci keberhasilan suatu UMKM. Penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi standar adalah permasalahan yang paling mendasar pada UMKM, karena itu UMKM banyak mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan, kurang terampilnya pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pelaku usaha masih terbatas informasi penerimaan dan pengeluaran.

Kondisi tersebut seperti dialami oleh UMKM yang menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Saat ini berdasarkan data tahun 2019, terdapat hampir 3000 unit UMKM yang menjadi mitra binaan Pemkot Bekasi. Selain fokus kepada pemberdayaan keuangan dan ketersediaan pasar, Pemkot Bekasi juga membantu UMKM binaannya dalam hal pembukuan dan keuangan melalui pelatihan penyusunan keuangan dengan melibatkan unsur akademisi. (<http://dakta.com/news/19027/pemkot-bekasi-fokusi-pemberdayaan-pelaku-umkm>, diakses tanggal 28 Mei 2020)

Hanya saja, dari sejumlah UMKM binaan yang ada, baru sekitar 15-20% saja yang sudah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Beberapa problem yang terjadi antara lain karena masih rendahnya kualitas SDM pengelola UMKM, pendampingan yang belum menyeluruh, serta kurangnya perhatian para pelaku UMKM terhadap peningkatan sistem manajemen keuangan usahanya.

Tabel 1.1 Gambaran UMKM Binaan Pemkot Bekasi

No	Sektor Usaha	Jumlah
1	Makanan-minuman	1.234
2	Produk Pakaian	143
3	Aksesoris	62
4	Kerajinan Tangan	133
5	Produk Tekstil dan Kulit	93
6	Ikan	122
7	Bordir	138
8	Boneka	143
9	<i>Furniture</i>	93
10	Batik	25
11	Jasa	210

Sumber: Dinkopumkm Kota Bekasi, 2019.

Data diatas merupakan gambaran unit usaha kecil dan mikro yang menjadi binaan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi. Dari total binaan, unit usaha mikro dan kecil yang sudah

menjalankan laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM 2018 adalah sebanyak 20% (sekitar 600an unit usaha). Unit usaha ini terbagi ke dalam usaha jualan makanan dari hasil ternak, usaha jualan minuman, industri rumahan makanan ringan, pengolahan minuman rumahan, penjahitan dan bordir rumahan, produksi batik rumahan, ternak dan budi daya ayam-ikan dan unggas, produksi kerajinan rumahan, mebel skala rumahan, dan produksi gesper dan tas rumahan.

Observasi awal yang peneliti lakukan kepada unit usaha mikro dan kecil di daerah Jatiasih, unit usaha UMK atau usaha mikro dan kecil di wilayah Jatiasih cukup di dominasi oleh jenis perdagangan, makanan dan minuman, perikanan dan jasa. Usaha mikro dan kecil di wilayah Jatiasih hingga tahun 2019 mencapai 138, angka itupun belum *valid* seluruhnya karena sensus ekonomi usaha mikro dan kecil yang masih berjalan hingga saat ini oleh BPS Kota Bekasi. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya potensi UKM di Jatiasih, akan tetapi dengan mengacu pada prosentase jumlah pelaku UKM yang hanya 20% menerapkan SAK EMKM, maka di Jatiasih pun masih banyak pelaku UKM yang berjalan selama ini adalah laporan keuangan manual, belanja bahan, perawatan dan pakan, dan pendapatan dari jualan, kemudian disimpan kembali untuk modal selanjutnya setelah dikurangi keuntungan.

Laporan keuangan sedianya disusun untuk mengetahui arus keuangan usaha, laba dan rugi yang diperoleh serta kemampuan aset yang dimiliki oleh usaha. Pada UMKM yang ada di Jatiasih, kondisi tersebut belum terjadi dimana penerapan secara teori dan praktek dari laporan keuangan selama ini masih bersifat manual dan konvensional.

Laporan keuangan usaha sangat penting bagi pelaku usaha, terutama sekali UMKM yang selama ini semakin berkembang. Fenomena yang ditemui salah satu pelaku usaha diatas, laporan keuangan yang diterapkan adalah pencatatan transaksi keuangan, tanpa adanya akumulasi akuntansi untuk perolehan laba rugi dengan memperhitungkan beban usaha berjalan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap laporan keuangan secara teoritis dan konseptual. Sementara laporan keuangan pada perkembangan hari ini untuk UMKM sudah semakin berkembang dimana bagi sektor UMKM sudah diatur dan

disediakan format laporan keuangan dengan mengadopsi pada standar akuntansi keuangan untuk sektor mikro dan kecil.

Pada tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. SAK ETAP salah satu standar akuntansi keuangan yang komplis, kemudian dipermudah dengan adanya standar akuntansi yang lain yaitu SAK EMKM. Adanya SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang lengkap, sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. SAK EMKM mulai diberlakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada 1 Januari 2018. Meskipun SAK EMKM terbilang sederhana, namun penyajian laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal.

(IAI, 2016) penyusunan laporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi keuangan termasuk bukti meningkatnya proses penyajian laporan keuangan yang efeknya adalah peningkatan kepercayaan pada laporan keuangan. Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Praktek pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada usaha mikro dan kecil yang diteliti, peneliti menanyakan bagaimana pengetahuan pelaku usaha terhadap SAK EMKM dan apakah pelaku usaha mengetahui apa saja pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tingkat pemahaman pelaku usaha dari wawancara awal tersebut menunjukkan bahwa SAK EMKM belum banyak pelaku usaha yang mengetahuinya apalagi menerapkannya dalam pelaporan keuangan usahanya. Gambaran tersebut menunjukkan adanya kelemahan dari penerapan laporan keuangan dan adopsi standar akuntansi khususnya untuk entitas kecil dan mikro (SAK EMKM) pada usaha mikro dan kecil.

Laporan keuangan sebagai bagian dalam pengambilan keputusan usaha sangat penting dipahami oleh para pelaku usaha. Pada kasus sektor UMKM, potensi yang mereka miliki serta peluang pembiayaan yang selama ini terus bergulir dari pemerintah maupun pihak swasta, seharusnya dapat disambut dengan penerapan pembukuan akuntansi keuangan yang sesuai dengan entitasnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat dengan tujuan agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Seperti pada penelitian Afrizal Purba (2019) tentang analisis penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM di Kota Batam, pelaku UMKM hanya menyusun laporan kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai laporan keuangan. Kemudian para pelaku UMKM juga belum melaksanakan Siklus akuntansi yang benar, yakni belum dimulai dengan penjurnalan transaksi, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, sampai diterbitkannya laporan keuangan. Juga dari komponen keuangan yang belum menyesuaikan dengan standar seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pembentuk kelemahan tersebut adalah karena minimnya pemahaman pelaku UMKM atas SAK EMKM, dan sumberdaya penyusun akuntansi keuangan usaha yang tidak ada (Purba, 2019).

Potensi pertumbuhan UMKM di Indonesia patut diperhatikan karena usaha ini menjadi sektor yang paling kuat dalam menghadapi tantangan global. Akan tetapi dari fenomena yang ditemui pada sektor UMKM di Jatiasih Kota Bekasi, pemahaman dan penerapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi masih sangat rendah.

Dari permasalahan yang sudah digambarkan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **-Evaluasi Penerapan SAK EMKM Terhadap Laporan Keuangan Pada UMKM Binaan Pemkot Bekasi Periode Januari Tahun 2020 (Studi di Kecamatan Jatiasih).**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaporan keuangan pada UMKM Binaan Pemkot Bekasi yang sudah berjalan selama ini?
2. Bagaimana pemahaman praktik dan teoritis UMKM Binaan Pemkot Bekasi mengenai SAK EMKM?
3. Bagaimana perbandingan laporan keuangan oleh UMKM Binaan Pemkot Bekasi yang diterapkan dengan SAK EMKM?

13 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Praktik pelaporan keuangan pada UMKM Binaan Pemkot Bekasi yang sudah berjalan selama ini.
2. Pemahaman praktik dan teoritis UMKM Binaan Pemkot Bekasi mengenai SAK EMKM.
3. Perbandingan laporan keuangan oleh UMKM Binaan Pemkot Bekasi yang diterapkan dengan SAK EMKM.

14 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Penelitian ini diharapkan berkontribusi berupa pemahaman mengenai penerapan SAK EMKM terhadap laporan keuangan pada UMKM binaan Pemkot Bekasi.
2. Bagi UMKM dan Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para pelaku UMKM khususnya mengenai kelebihan dari laporan keuangan dengan menerapkan SAK EMKM. Bagi Pemerintah Kota Bekasi, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi memberikan pendampingan terhadap UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara andal.
3. Bagi pembaca
Diharapkan penelitian ini berguna bagi pembaca dengan mengetahui evaluasi penerapan SAK EMKM terhadap laporan keuangan pada UMKM binaan Pemkot Bekasi.

